Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Comparison of Narcotics Criminal Investigator Position According to Law Number 35 Year 2009 Regarding Narcotics and the Criminal Law Code

Ramses Hutagaol

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Rokania, Indonesia

Diterima: Juli 2019; Disetujui: Oktober 2019; Dipublish: Desember 2019

*Corresponding Email: ramseshutagaol06@gmail.com

Abstrak

Adanya Kewenangan antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya dibidang penyidikan menyebabkan terjadinya dualisme dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Kewenangan Badan Narkotika didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan Penyidi POLRI. Pengaturan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nasional dalam rangka mencegah berkembangnya tindak pidana narkotika yang semakin terorganisir. Selain itu koordinasi yang baik perlu terus dilakukan antara pihak kepolisian dan PPNS BNN. Agar Pemerintah membuat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang batas-batas kewenangan diantara lembaga penegak hukum seperti PPNS Badan Narkotika Nasional dan Polri agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan dualisme penyelidikan.

Kata Kunci: Narkotika, Penyidik.

Abstract

The existence of Authority between Investigators of the National Narcotics Agency and the Republic of Indonesia Police Article 81 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, especially in the field of investigation, causes a dualism in the investigation of narcotics crime. The authority of the Narcotics Agency in Law Number 35 of 2009 has a greater portion than the Police Discipline. The regulatory authority for the investigation of the National Narcotics Agency in Law Number 35 Year 2009 concerning National Narcotics in the context of preventing the development of increasingly organized narcotics crime. In addition good coordination needs to be continued between the police and PPNS BNN. In order for the Government to make laws and regulations governing the limits of authority between law enforcement agencies such as the PPNS National Narcotics Agency and the National Police so that there are no differences in interpretation and investigation dualism.

Keywords: *Narcotics, Investigators.*

How to Cite: Ramses Hutagaol (2019). Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2): 86 - 95

PENDAHULUAN

Kedudukan Lembaga Kepolisian sebagai lembaga negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai Penegak Hukum. Penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi (Huda, 2007). Berdasarkan kedudukan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang diatur didalam Konstitusi tidak berarti kedudukan Polri lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan undang-undang (Asshiddiqe, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa pengemban fungsi kepolisian di bidang penyidikan dalam beberapa hal tertentu bahwa Penyidik Polri tidak berdiri sendiri. Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang menyebutkan bahwa selain penyidik Polri, terdapat penyidik Pegawai Negeri Sipil yang juga memiliki fungsi penyidikan tindak pidana tertentu. Fungsi kepolisian yang diberikan kepada penyidik pegawai negeri sipil yang sifatnya membantu Kepolisian dalam mengemban fungsi kepolisian, tampaknya sudah tidak sejalan lagi. Hal ini ditandai dengan hadirnya beberapa undang-undang tertentu yang memberikan kewenangan bagi PPNS sebagai satu-satunya lembaga Negara yang berwenang menjalankan fungsi kepolisian dalam menegakkan hukum. Sementara Kepolisian sebagai lembaga pokok pengemban fungsi kepolisian dibatasi kewenangannya.

Pembatasan kewenangan Polri ini dapat dilihat pada ketentuan tentang wewenang penyidikan, yang mana kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tertentu hanya diberikan kepada PPNS tertentu,

sedangkan Polri diberikan kewenangan hanya apabila diminta oleh PPNS. Namun demikian kewenangan yang diberikan kepada Polri tersebut masih belum jelas batas-batasnya bagi Polri yang secara kelembagaan memiliki tugas pokok untuk menegakkan hukum.

Hadirnya lembaga Badan Narkotika Nasional tentunya akan menjadi *duet mechanism* terhadap penegak hukum tindak pidana narkotika bersama dengan lembaga kepolisian bahkan di samping itu masih ada penyidik lainnya yakni penyidik pegawai negeri sipil (Sirait & Rafiqi, 2018; Manao, & Triono, 2013). Badan Narkotika Nasional diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di samping dapat juga dilakukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Keduanya harus saling berkoordinasi dan saling memberitahu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

Meskipun keduanya harus saling berkoordinasi tetapi telah memberi sinyalemen atau petunjuk tentang ketidakmampuan (*inability*) dari kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewengangnya dalam melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil posisinya juga penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun selaku koordinator dan pengawas tetap berada dipihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana telah digariskan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Permasalahan kewenangan dapat menjadi polemik institusional yang patut menjadi perhatian. Kewenangan menyangkut masalah integritas institusional dan selalu terjadi upaya pencegahan-pencegahan terhadap pengurangan kekuasaan. Pengurangan

kekuasaan dapat menimbulkan sikap persepsi keliru dari institusi yang menerima pengurangan tersebut. Institusi dapat dianggap tidak mampu dan tidak cakap melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang bahkan dianggap tidak pernah memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan masyarakat apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan (Nainggolan, Elvi, & Saparuddin, 2010).

Wewenang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dimiliki oleh dua lembaga yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional ditambah dengan penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 6 (1) huruf (b), bahwa penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Sedangkan untuk wewenang Badan Narkotika Nasional diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Wewenang penyidik BNN untuk melakukan penyidikan terdapat dalam Pasal 75.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan wewenang kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka melakukan penyidikan. Kewenangan Badan Narkotika Nasional ini ditambah dalam Pasal 80 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyidik BNN. Ketentuan Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwa wewenang dari Badan Narkotika Nasional sangat luas, sehingga dimungkinkan akan bertabrakan atau berbenturan dengan wewenang yang dimiliki oleh institusi Polri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum dengan judul "Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Akibat Hukum Terhadap Dualisme Dalam Tugas dan Fungsi Penyidik Tindak Pidana Narkotika Pada Ketatanegaraan Indonesia; 2) Ideal Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan dan Penyelidikan Kepolisian (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; 3) Faktor Kendala Dalam Dualisme Kewenangan Penyidikan dan Penyelidikan Kepolisian (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun sifat penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah preskriptif, berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk diterapkan (Marzuki, 2009). Lebih lanjut Marzuki menyatakan oleh karena itu yang dihasilkan oleh penelitian hukum, sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru (Marzuki, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Dualisme Dalam Tugas dan Fungsi Penyidik Tindak Pidana Narkotika Pada Ketatanegaraan Indonesia

Penyidikan sebagaimana yang di atur menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. De Pinto mengemukakan bahwa menyidik (*opsporing*) diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah merekan dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum (Mulyadi, 2012).

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual baik melalui penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka, serta tindakan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi (Wisnubroto, 2002).

Penyidikan adalah tindakan mencari kejahatan yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya atau di duga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan maka harus di usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana, dan jika benar demikian siapakah pelakunya (Print, 1998).

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam

ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses pneyidikan itu dinyatakan selesai (Hartono, 2010).

Tahap penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik termasuk penyidikan tambahan atas dasar petunjuk dari penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan. Penyidikan didasarkan karena adanya dugaan telah atau sedang terjadinya tindak pidana yang dapat berasal dari laporan atau pengaduan, diketahui sendiri oleh penyidik atau karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana (Hamzah, 1989).

Sasaran atau target penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang atau jelas, dan sekaligus menemukan siapa tersangka/pelakunya. Upaya pembuktian dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam KUHAP, yaitu dengan melakukan kegiatan, tindakan mencari, menemukan, mengumpulkan, dan melakukan penyitaan terhadap alat-alat bukti yang sah dan benda/barang bukti (Kuffal, 2010).

Kewenangan penyidikan dimiliki oleh penyidik dan penyidik pembantu. Adapun pengertian penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lebih lanjut, Pasal 6 KUHAP menyatakan Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dari Pasal 6 KUHAP di atas, dengan jelas menyatakan bahwa penyidik terdiri dari dua yaitu penyidik Polri dan penyidik

pegawai negeri sipil. Mengenai penyidik Polri dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian yang dalam pelaksanaannya oleh penyidik dan penyidik pembantu. Sedangkan bagi penyidik pegawai negeri sipil diberi kewenangan yang bersumber dari ketentuan undang-undang pidana khusus untuk melakukan penyidikan, sehingga wewenang penyidikan yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri (Harahap, 2012).

Kewenangan penyidikan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya kepada diberikan penyidik BNN, tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 81, yang menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang ini.

Maksud dari Pasal 81 di atas, bahwa penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan Narkotika juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN. Tidak ada yang lebih superior antara penyidik Polri dan penyidik BNN, keduanya memiliki kewenangan yang sama, dan saling bekerjasama satu sama lain dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan demikian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Badan Narkotika Nasional mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana Narkotika

menurut tata cara sebagaimana diatur baik dalam hukum pidana materiil maupun formil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika di wilayah Republik Indonesia (Daniel, 2013).

Konsep Ideal Kewenangan PPNS BNN Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Penegak hukum khusus mengenai pemberantasan Narkotika di Indonesia. Penyidik PPNS yang ada di BNN adalah termasuk juga sebagai penyidik. Berdasarkan UU No 35 tahun 2009, kewenangan penyidik BNN sebenarnya yang memiliki peran sentral dalam rangka melakukan penyidikan bagi tindak pidana narkotika di tengah masyarakat.

Di dalam Pasal 70 UU No. 35 tahun 2009 menegaskan tugas Badan Narkotika Nasional yaitu: 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 3) Berkoordinasi dengan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Mengenai kewenangan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 11 KUHAP yaitu penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat 1, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Selain kewenangan penyidikan kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), juga terdapat penyidik lain menurut undang-undang tindak pidana khusus seperti penyidik pada Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan kewenangan penyidikan terhadap penyidik Badan Narkotika Nasional.

Selanjutnya dikatakan oleh Pasal 71 UU No. 35 tahun 2009 bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. berdasarkan Pasal 71 tersebut, bahwa Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Penyidik BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. UU No. 35 tahun 2009 mengatur bahwa pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN diatur secara internal kelembagaan BNN melalui Peraturan Kepala BNN.

Secara tegas bahwa kewenangan dari Penyidik PPNS BNN diatur dalam Pasal 75 UU No. 35 tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan sertaketerangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Kewenangan Penyidik BNN sebagaimana diatur pada Pasal 75 UU No. 35 tahun 2009 menegaskan bahwa semua tindakan-tindakan penyidikan masuk dalam ruang lingkup kewenangan Penyidik BNN, sehingga memungkinkan untuk Penyidik BNN melaksanakan kewenangan yang dimilikinya secara maksimal dalam rangka pemberantasan penggunaan dan peredaran narkotika ilegal.

Kewenangan penyidik BNN harus ditegaskan dalam bentuk surat tugas dari Kepala BNN kepada setiap penyidik BNN. Penegakan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para penyidik untuk melakukan kewenangannya sebagai penyidik.

Menurut Pasal 88 UU No. 35 tahun 2009, bahwa Penyidik BNN dalam hal hubungan kewenangan, tugas dan fungsi dapat membangun hubungan dengan PPNS tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika. PPNS tertentu menurut Pasal 88 UU No. 35 tahun 2009 dapat melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan presekutro narkotika. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dapat menyedatkan ayam dirumah. Perjanjian antara Penyidik BNN, Penyidik POLSI, Penyidik PPNS harus dibuat dalam bentuk kesepakatan antara pimpinan kelembagaan agar mendapatkan kepastian hukum dan memaksimalkan kinerja penyidik Polri.

Kedudukan penyidik BNN secara tegas dikatakan lebih luas dibandingkan dengan penyidik Polri maupun penyidik PPNS (misal: PPNS Bea cukai), akan tetapi dalam keseharian, penyidik Polri lebih

gencar dibandingkan dengan penyidik BNN.

Kedudukan PPNS dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri yang telah berjalan sekian lama sejak berlakunya KUHP ternyata mengakibatkan implikasi yang fatal. Hal ini karena pada kenyataannya PPNS malah menjadi inferior, tidak percaya diri dalam melaksanakan tugas dan wewengannya, dan dalam sistem seperti itu yang berjalan sekian lama akhirnya mengkerdikan peran, eksistensi, mental dan kemampuan PPNS. Peran PPNS dalam sistem peradilan pidana masih dikebiri didalam KUHP itu sendiri. Masing-masing Kementerian pada pemerintahan yang memiliki PPNS untuk menegakkan hukum dan mengawal pelaksanaan *Administrative Penal Law* di bidang kewenangannya, masih belum memberdayakan sumber daya manusianya dan makin terbelenggu oleh sistem yang melemahkan mereka secara sistematis.

Kendala Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Polri dan PPNS BNN Dalam Tindak Pidana Narkotika

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pihak PPNS BNN dan Kepolisian terkadang terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika.

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan peraturan Daerah diatas belum terjalin secara maksimal disebabkan masing-masing instansi bergerak secara individual dengan mengenyampingkan koordinasi sehingga ukuran tingkat keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin menjamur dan berkembang di Indonesia saat sekarang itu. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika perlu dilakukan komunikasi yang baik antara penyidik PPNS Badan Narkotika Nasional

dengan pihak Kepolisian agar penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dapat berjalan secara baik.

Keduanya harus saling berkoordinasi dan saling memberitahu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba. Meskipun keduanya harus saling berkoordinasi tetapi telah memberi sinyalemen atau petunjuk tentang ketidakmampuan (*inability*) dari kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkoba dengan baik. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil posisinya juga penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun selaku koordinator dan pengawas tetap berada dipihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana telah digariskan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Timbulnya berbagai masalah seperti lemahnya koordinasi antar penyidik, tumpang tindih wewenang, sikap intansi sentris dan arogansi di antara penyidik, dapat menjadi faktor kriminogen dalam proses penegakan hukum pidana karena kekuasaan penyidikan adalah merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana dan sistem peradilan pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegak hukum "*in concreto*" (Arief, 2005).

2. Sistem Perekrutan Penyidik PPNS BNN Yang Kurang Efektif

Perekrutan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dari kalangan umum mungkin tidak efektif karena harus melakukan pendidikan dan pelatihan yang memakan waktu cukup lama. Padahal kejahatan narkoba dan prekursor narkoba cenderung semakin meluas dan prevalensi penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat. Dalam perkembangannya Badan Narkotika Nasional merekrut Penyidik dari kalangan umum untuk dijadikan penyidik Badan Narkotika Nasional dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Narkotika Nasional untuk turut serta dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keberadaan Badan Narkotika Nasional dengan kewenangannya telah menjadikan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga superboby dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

3. Aturan yang Masih Tumpang Tindih

Kewenangan Badan Narkotika Nasional yang terlalu besar seperti dalam penahanan dan penggeledahan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak sama dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik polisi dan penyidik pegawai negeri sipil. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan secara kelembagaan serta egoisme institusional diantara lembaga penegak hukum.

Lembaga non-struktural ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Badan Koordinasi Narkotika Nasional juga bertugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat (Adiktif) lainnya (P4GN).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan dalam membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Badan Koordinasi Narkotika Nasional juga dapat menerapkan kebijakan dan strategi bidang pencegahan, antara lain mengurangi atau menekan permintaan narkoba, mengurangi dan menekan dampak buruk narkoba serta mengurangi atau menekan pasokan narkoba.

SIMPULAN

Kewenangan yang sama antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia Pasal 81 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya bidang penyidikan menyebabkan terjadinya dualisme dalam penyidikan tindak pidana narkoba yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pengaturan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan respon atas perkembangan tindak pidana narkoba, kewenangan yang begitu luas yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka mencegah berkembangnya tindak pidana narkoba yang semakin terorganisir dan mencakup wilayah antar negara baik regional, dan internasional. Badan Narkotika Nasional sejajar dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana yang menangani kasus tindak pidana narkoba, posisi yang sejajar ini diperlukan batasan dan pembeda diantara Badan Narkotika

Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana narkoba.

Kendala dalam Penyelidikan Polri dan PPNS BNN dalam tindak pidana narkoba diantaranya adalah faktor komunikasi (*Communication*) atau Koordinasi, Sistem Perekrutan Penyidik PPNS BNN Yang Kurang Efektif, Aturan yang Masih Tumpang Tindih.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2005). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Asshiddiqe, J. (2010). Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daniel, A. S. (2013). Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1989). Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. (2012). Pembahasan Penerapan dan Permasalahan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2010). Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N. (2007). Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi. Yogyakarta: UII Press.
- Kuffal, H. (2010). Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press.
- Manao, H., dan Triono E., (2013), Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb), Mercatoria, 6 (2): 176-189
- Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, L. (2012). Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: Alumni.
- Nainggolan, M., Elvi Z., dan Saparuddin, (2010), Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), Mercatoria, 3 (2): 116-132
- Print, D. (1998). Hukum Acara Pidana dalam Praktek. Jakarta: Djambatan.
- Silalahi, D.H. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di SAT RES Narkoba Polres Tebing Tinggi, 5 (2): 60- 67.

- Sirait, E.W. & Rafiqi (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn), 5 (1) 2018: 1-7.
- Wisnubroto, A. (2002). Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana). Jakarta: Galaxy Puspa Mega.